



LAPORAN SINGKAT RAPAT KOMISI IX DPR RI

- Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 10
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 20 Maret 2018
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : 1. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait *road map* pembangunan ketenagakerjaan dan upaya perluasan kesempatan kerja terhadap:
a. Dampak era digitalisasi dan bonus demografi 2030;
b. Proyek Infrastruktur dengan jumlah angkatan kerja nasional dan jaminann sosial;
c. Program pemagangan sebagai program prioritas nasional.
2. Optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan K3 terhadap pengerjaan proyek infrastruktur di Indonesia;
3. Koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan lintas instansi dalam merealisasikan amanat UU BPJS mengenai pengalihan program tabungan hari tua PT. Taspen (Persero) dan Program asuransi sosial PT. ASABRI kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Program moratorium penempatan TKI ke Malaysia dan Program penempatan ke Timur Tengah.
- Ketua Rapat : Dede Yusuf M.E, S.T.,M.I,Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. 21 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
4 orang anggota izin;
B. Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dibuka pukul 16.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap pemerintah Saudi Arabia dan Malaysia serta meningkatkan koordinasi dengan kedua Pemerintah Negara tersebut dalam memenuhi ketentuan hukum Internasional terhadap pekerja Migran yang menghadapi permasalahan hukuman mati sehingga kehadiran Negara pada setiap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memperkuat peran BLK dalam pengembangan dan pelatihan *skill* calon tenaga kerja diberbagai bidang terutama di bidang Teknologi Informasi dalam menghadapi perubahan era digitalisasi.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengambil upaya yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terkait pengalihan program Jaminan Hari Tua dan Pensiun dari PT. Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dan pengalihan asuransi sosial dari PT. ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan kebutuhan ahli K3 terutama pada proyek infrastruktur dan industri sehingga dapat meminimalisir insiden kecelakaan kerja pada setiap proyek yang sedang berjalan.

Rapat diakhiri pukul 18.30 WIB.

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,

TTD

DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol

A-415